

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pada penyelenggaraan pemerintahan. Penerapan teknologi informasi dalam kegiatan pemerintahan menjadi salah satu upaya untuk mendukung terciptanya tata kelola yang efektif, efisien, dan transparan (Santoso, 2025). Melalui penerapan sistem berbasis digital, berbagai proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh berbagai pihak (Amrozi dkk., 2022). Salah satu aspek penting dari penerapan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah adalah sistem pengarsipan dokumen. Arsip memiliki peran yang krusial sebagai sumber informasi, bukti administrasi, serta dasar dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan arsip yang baik sangat berpengaruh terhadap efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Soulthoni & Itasari, 2025). Oleh karena itu, penerapan sistem pengarsipan dokumen berbasis digital menjadi kebutuhan penting bagi instansi pemerintah untuk memastikan proses administrasi berjalan lebih efisien dan akuntabel.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang memiliki peran strategis dalam merencanakan, mengendalikan, serta mengevaluasi pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Bappeda (Pemerintah Kota Padang, 2022), instansi ini berfungsi membantu Wali Kota dalam perencanaan pembangunan daerah, penelitian, dan pengembangan. Dalam pelaksanaannya, Bappeda terdiri atas 6 bidang yang mana ada Sekretariat dan lima bidang lainnya, yaitu Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia; Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; serta Bidang Penelitian dan Pengembangan. Setiap bidang menghasilkan berbagai dokumen penting, seperti dokumen perencanaan, laporan pembangunan, dan arsip kegiatan.

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 69 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, setiap bidang di Bappeda Kota Padang memiliki tugas dan fungsi yang saling berkaitan dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah bertugas melakukan pengumpulan dan analisis data pembangunan, mengintegrasikan program pembangunan, serta menyusun dokumen perencanaan seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Sementara itu, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, serta Bidang Penelitian dan Pengembangan melaksanakan penyusunan perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, serta penyediaan data sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Keterkaitan tugas tersebut menyebabkan setiap bidang tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga membutuhkan dokumen dari bidang lain sebagai bahan koordinasi, sinkronisasi program, penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pengambilan keputusan. Dengan demikian, pertukaran dokumen dan informasi antarbidang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda Kota Padang (Pemerintah Kota Padang, 2022).

Sebaliknya, setelah dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD, RKPD, maupun hasil evaluasi pembangunan disusun oleh Bidang P2EPD, dokumen tersebut kembali digunakan oleh seluruh bidang sebagai pedoman dalam menyusun program kerja, melaksanakan monitoring, melakukan evaluasi kinerja, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang urusannya masing-masing. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan oleh

satu bidang tidak hanya berfungsi sebagai arsip internal, tetapi juga menjadi referensi bagi bidang lainnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Proses pertukaran dokumen tersebut meliputi penyampaian data pendukung, laporan kegiatan, dokumen perencanaan, hasil evaluasi, serta berbagai dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar koordinasi antarbidang. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan arsip yang mampu mendukung penyimpanan, pencarian, dan distribusi dokumen secara terintegrasi agar proses pertukaran informasi dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan terdokumentasi dengan baik.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pegawai, saat ini Bappeda Kota Padang belum memiliki sistem informasi pengarsipan dokumen berbasis web yang mampu mengelola arsip secara digital dan terintegrasi antarbidang. Proses penyimpanan dokumen masih dilakukan secara manual atau menggunakan media penyimpanan sederhana, seperti folder pada komputer masing-masing bidang.

Berdasarkan keterangan pegawai, secara keseluruhan Bappeda Kota Padang menghasilkan rata-rata sekitar 20–25 dokumen per hari, yang meliputi surat masuk, surat keluar, laporan kegiatan, serta dokumen perencanaan. Dengan asumsi 22 hari kerja dalam satu bulan, jumlah tersebut dapat mencapai sekitar 440–550 dokumen per bulan, atau lebih dari 5.000 dokumen per tahun.

Jumlah dokumen yang terus bertambah setiap tahunnya tersebut, tanpa didukung sistem pengelolaan arsip yang terpusat dan terintegrasi, berpotensi menimbulkan permasalahan seperti duplikasi data, keterlambatan dalam proses pencarian arsip, serta meningkatnya risiko kehilangan dokumen penting. Selain itu, keterbatasan akses antarbidang juga dapat menghambat efektivitas koordinasi dan pertukaran informasi dalam pelaksanaan tugas.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengembangkan sistem informasi pengarsipan dokumen berbasis web, seperti yang dilakukan oleh Supriyanto & Savira (2024). Namun, sistem tersebut masih bersifat *single user*, di mana

proses pengarsipan hanya dapat dilakukan oleh satu admin tanpa adanya pembagian hak akses antar pengguna. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Koten dkk., (2025) telah mengembangkan sistem informasi pengarsipan surat berbasis *Website* yang mendukung pengelolaan surat masuk dan surat keluar secara digital sehingga proses pengarsipan menjadi lebih efektif dan terstruktur. Meskipun demikian, sistem tersebut masih berfokus pada pengelolaan arsip dalam satu lingkungan kerja dan belum dirancang untuk mendukung pengelolaan arsip secara terintegrasi antarbidang kerja di satu instansi. Atas dasar permasalahan tersebut, penelitian ini mengembangkan Sistem Informasi Pengarsipan Dokumen berbasis web dengan fitur *multi user* yang memungkinkan setiap bidang di Bappeda Kota Padang mengelola arsipnya masing-masing secara terintegrasi dalam satu platform. Selain itu, sistem yang dikembangkan pada penelitian-penelitian sebelumnya umumnya belum menyediakan mekanisme pengelompokan arsip aktif dan arsip inaktif secara otomatis berdasarkan masa retensi, sehingga pengelolaan dokumen pada penelitian ini dirancang menjadi lebih terstruktur sesuai dengan siklus pengelolaan arsip.

Berdasarkan permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan dengan membangun sistem informasi pengarsipan dokumen berbasis web pada Bappeda Kota Padang. Sistem tersebut ditujukan untuk mendukung kegiatan pengarsipan mulai dari penyimpanan, penelusuran, hingga pengelolaan dokumen dalam satu sistem yang dapat digunakan oleh berbagai bidang. Pengaturan pengguna menjadi salah satu bagian penting dalam sistem melalui penerapan *multi level user*. Dalam penerapannya, terdapat tiga tingkatan pengguna, yaitu admin utama (Arsiparis), admin bidang, dan pegawai. Masing-masing tingkatan diberikan fungsi yang berbeda berdasarkan tanggung jawabnya. Admin utama dapat melakukan pemantauan terhadap arsip yang berasal dari seluruh bidang, sedangkan admin bidang bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumen pada bidangnya, termasuk proses penambahan,

perubahan, dan penghapusan arsip. Sementara itu, pegawai diberikan fasilitas untuk menelusuri dan melihat dokumen yang berkaitan dengan bidangnya. Selain pengaturan hak akses, sistem menyediakan kode klasifikasi arsip yang disesuaikan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 120 Tahun 2022. Kode tersebut digunakan sebagai acuan dalam mengelompokkan dokumen berdasarkan jenis arsipnya. Sistem juga mendukung pengelolaan arsip terbuka, sehingga dokumen yang tersedia dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki kewenangan berdasarkan tingkatan akses yang telah ditetapkan.

Selain itu, sistem ini juga dilengkapi dengan fitur pengelompokan arsip aktif dan arsip inaktif, yang memungkinkan dokumen disusun berdasarkan status penggunaannya untuk mendukung pengelolaan arsip yang lebih sistematis. Pengelompokan arsip aktif dan inaktif ini bertujuan untuk memisahkan dokumen yang masih sering digunakan dari dokumen yang jarang diakses, namun tetap perlu disimpan sebagai bukti administrasi dan referensi perencanaan. Sistem juga menerapkan mekanisme pengelompokan dokumen secara otomatis berdasarkan bidang kerja, guna meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses pengarsipan di lingkungan Bappeda Kota Padang.

Dengan adanya sistem ini, diharapkan proses pengelolaan arsip di Bappeda Kota Padang menjadi lebih cepat, rapi, dan mudah diakses oleh setiap bidang. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada penerapan teknologi, tetapi juga pada upaya meningkatkan koordinasi dan efisiensi kerja di lingkungan pemerintahan. Hasil pengembangan sistem ini diharapkan dapat menjadi langkah awal menuju pengelolaan arsip pemerintahan yang lebih modern dan terintegrasi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang dan membangun sistem informasi pengarsipan dokumen berbasis web yang dapat mempermudah proses

penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip secara digital serta terintegrasi antarbidang di lingkungan Bappeda Kota Padang?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perancangan dan pembangunan sistem informasi pengarsipan dokumen berbasis web di lingkungan Bappeda Kota Padang.
2. Sistem hanya dapat digunakan oleh pegawai Bappeda Kota Padang, yang meliputi admin utama (Arsiparis), admin bidang, dan pegawai, tanpa memberikan akses kepada pihak luar.
3. Sistem ini hanya digunakan untuk menyimpan, mencari, dan menampilkan dokumen yang sudah ada, bukan untuk membuat atau menyunting dokumen baru di dalam sistem ini.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk merancang dan membangun sistem informasi pengarsipan dokumen berbasis web yang dapat mempermudah proses penyimpanan, pencarian, dan pengelolaan arsip secara digital serta terintegrasi antarbidang di lingkungan Bappeda Kota Padang.

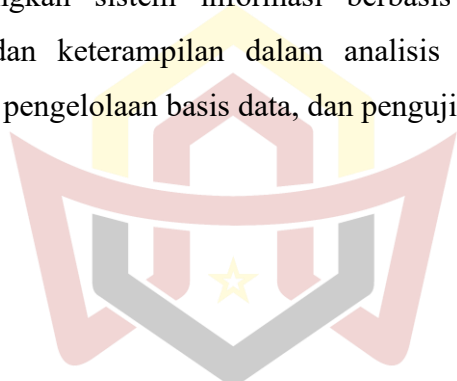
E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang berkaitan. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain:

1. Bagi Pengguna (Pegawai): Memberikan kemudahan dalam mengelola dokumen sesuai bidang masing-masing melalui fitur *multi-level User*, yang membedakan hak akses antara admin dari setiap bidang dan

pegawai. Dengan sistem ini, proses pencarian dan pertukaran dokumen menjadi lebih cepat, akurat, dan aman.

2. Bappeda Kota Padang: Memberikan solusi sistem informasi pengarsipan dokumen yang lebih efisien, terpusat, dan terstruktur sehingga dapat mempermudah proses penyimpanan, pencarian, serta pengelolaan arsip antarbidang. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas koordinasi antar unit kerja serta mendukung upaya digitalisasi administrasi di lingkungan Bappeda Kota Padang.
3. Penulis: Memberikan pengalaman langsung dalam merancang dan mengembangkan sistem informasi berbasis web, serta menambah wawasan dan keterampilan dalam analisis kebutuhan, perancangan antarmuka, pengelolaan basis data, dan pengujian sistem informasi.



UIN IMAM BONJOL
PADANG